



IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM INFORMASI JARINGAN PETERNAKAN DALAM PENDEKATAN *E-GOVERNMENT* (Studi Kasus Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)

Irwansyah¹, Muhammad Ardiansyah²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 2024

Revised April 2024

Accepted April 2024

Available online April 2024

Kata Kunci:

Implementasi; e-government; peternakan.

Keywords:

Implementation; e-government; animal husbandry.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Bandar Lampung.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) pada pendekatan utama sistem pemerintahan E-Government di Lampung Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 6 informan. Berdasarkan hasil pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa terdapat temuan program SIJINAK yang masih belum dilakukan secara efektif dilihat melalui empat dimensi yaitu dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih bertahap di setiap Kabupaten, Sumber Daya pengadaan fasilitas serta pembiayaan pengembangan SIJINAK yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan pengembangan aplikasi SIJINAK, Disposisi mengenai keterbatasan penggunaan layanan nternet dalam mengakses SIJINAK dan pada struktur birokrasi ditemukan kelemahan mengenai pembagian tugas.

ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the implementation of the livestock network information system (Sijinak) in the main approach to the E-Government system in Lampung, Livestock and Animal Health Service. This research use descriptive qualitative approach. Data collection uses interviews and documentation. The sampling technique used was purposive sampling with a sample size of 6 informants. Based on the results of this research, it can be concluded that there are findings that the SIJINAK program has not been carried out effectively, seen through four dimensions, namely in the communication carried out by the Animal Husbandry and Animal Health Service which is still being phased in in each district, resources for the procurement of facilities and financing for the development of SIJINAK. limited and lack of experts who have the ability to develop SIJINAK applications, Disposition regarding the limited use of internet services in accessing SIJINAK and in the bureaucratic structure weaknesses were found regarding the division of tasks.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem penyelenggaraan pelayanan publik sangat penting untuk mencapai pelayanan publik yang efektif dan efisien, dengan adanya perubahan inovasi dalam pelayanan publik. Pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan masyarakat dengan mengumpulkan informasi publik untuk menjamin pelayanan yang baik dan memuaskan kepada masyarakat. Pengetahuan tentang teknologi yang saat ini berkembang sangat baik di pemerintahan dan masyarakat akan membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia.

Di lingkungan pemerintahan, inovasi pelayanan publik agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, dengan adanya e-Government untuk memodifikasi pelayanan publik untuk mencapai kualitas dan

*Corresponding author

E-mail addresses: irwansyah.20111011@student.ubl.ac.id



efisiensi pelayanan publik. Dalam (Instruksi Presiden (INPRES) No 3 Tahun 2003) dilanjutkan dengan instruksi untuk menyusun rencana nduk pengembangan e-Government yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari e-Government adalah untuk membentuk jaringan komunikasi antara sektor publik, sektor swasta dan pemerintah lainnya untuk memfasilitasi interaksi, transaksi dan layanan.

Menurut (Suaedi & Wardiyanto, 2010), e -Government adalah mekanisme interaksi baru antara pemerintah, masyarakat dan kelompok berkepentingan lainnya, termasuk penggunaan teknologi informasi (khususnya nternet) dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, dalam proses pelayanan di pemerintahan dengan berkembangnya e-goverment menghasilkan penyelenggaraan pelayanan yang efisien dan efektif, masing-masing daerah mengatur sendiri pelayanan publik bagi warganya dengan perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya terletak di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Lampung yang sedang melaksanakan program *Smart City* Lampung.

Provinsi Lampung yang terletak di ujung pulau Sumatra merupakan salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah yang meliputi sektor yaitu pertanian, peternakan dan pariwisata. *Review* dari industri peternakan di Lampung Tengah yang mempunyai jumlah ternak terbanyak dan terus meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya hewan ternak, Provinsi Lampung dalam *Smart City* telah merilis inovasi layanan kepada masyarakat (peternak) yaitu Sistem informasi Jaringan Ternak (Sijinak), dengan hadirnya aplikasi ini sering meningkatkan hewan peliharaan pengelolaan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dikembangkan. Pengembangan sektor peternakan perlu dilakukan mengingat kebutuhan bahan makanan yang mengandung protein hewani dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahan Makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging merah, daging ayam, telur dan lain lain (David, 2019).

Gambar 1.1 Perkembangan Konsumsi Pangan Hewani, Tahun 2015 – 2020 (Kg/Kap/Tahun)



Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2021)

Berdasarkan Data pada gambar 1.1 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tentang pertumbuhan masing masing komoditas terutama hewan unggas mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat akan pemenuhan gizi bagi tubuhnya serta dukungan dari perkembangan ilmu pengetahuan dari sektor teknologi yang semakin maju.

Tabel 1.1 Populasi Unggas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2023.

Kabupaten/Kota	Jumlah
Lampung Barat	-
Tanggamus	375.010
Lampung Selatan	17.500.000



Lampung Timur	6.500.000
Lampung Tengah	2.253.080
Lampung Utara	1.394.190
Way Kanan	648.050
Tulang Bawang	217.690
Pesawaran	4.347.700
Pringsewu	2.120.000
Mesuji	231.800
Pesisir Barat	2.000
Tulang Bawang Barat	775.110
Bandar Lampung	21.500
Metro	1.336.000
Lampung	37.722.130

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Data tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-2 di Provinsi Lampung sebagai kabupaten yang memiliki populasi ayam ras pedaging cukup tinggi, yaitu dengan jumlah total 6.500.000 ekor. Sedangkan urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah ayam ras pedaging sebesar 17.500.000 ekor. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung melakukan perubahan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi *public*. Kemunculan sistem tersebut, dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008) tentang Rencana Tata Ruang Nasional merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pembangunan berbasis teknologi pintar berita di daerah.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung melakukan perubahan pelayanan yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam keterbukaan informasi *public*. Kemunculan sistem tersebut, dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008) tentang Rencana Tata Ruang Nasional merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pembangunan berbasis teknologi pintar berita di daerah.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung berharap Sistem informasi Jaringan Peternakan (Sijinak) dapat mendukung program *smart city* Lampung, dimana sistem Sijinak diterapkan dalam pengelolaan data peternakan di Lampung. Sehingga masyarakat tidak dapat mengakses aplikasi Sijinak sehingga aplikasinya mengalami kendala pada saat implementasi karena aplikasi Sijinak ini akan membantu operasional peternakan dari hulu hingga hilir pada sistem Sijinak di mengkonsolidasikan sistem database "ternak" dan "peternak" akan dioperasikan melalui sistem informasi jaringan peternakan, menggunakan kartu peternakan yang memiliki generator barcode yang terhubung ke *server database breed*.

Oleh karena itu, program baru tentunya akan mempunyai kesenjangan dalam pelaksanaan pengelolaan data peternakan di Provinsi Lampung, dimana permasalahannya mungkin terletak pada sumber daya manusia yang tidak kompeten secara teknologi dalam sistem keagenan pengelolaan. Sijinak sendiri merupakan kolaborasi antar organisasi pendukung keamanan data peternakan dan infrastruktur berupa teknologi informasi dengan kapasitas implementasi sistem yang kecil. Selain permasalahan di atas tentu saja peran serta masyarakat (pengembala) untuk mendukung penerapan sistem Sijinak. Maka dari situlah penulis mengambil judul untuk skripsi ini dan ingin mendalami tingkat implementasi sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) dalam menggunakan teknologi dengan pendekatan Electric Government pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Teori

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi menurut teori Jones bahwa: "*Those Activities directed toward putting a program into effect*" (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi



implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Membicarakan tentang implementasi tidak lepas dari kebijakan publik itu sendiri, implementasi kebijakan dapat menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dan swasta dalam menetapkan kebijakan. Kebijakan, menurut (Tahir, 2015) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan tertentu sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik kemudian menunjukkan implementasi tujuan. Implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012).

Dalam proses pelaksanaan atau implementasi, ada tantangan yang menghalangi pencapaian sasaran dan tujuan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan atau program termasuk kekurangan sumber daya, dukungan organisasi, dan komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Implementasi kebijakan telah berkembang untuk menentukan apakah sebuah program atau sasaran akan berhasil mencapai tujuan bersama. Untuk menganalisis masalah yang dihadapi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, ada banyak model implementasi. Untuk menilai implementasi kebijakan publik, diperlukan sebuah model kebijakan atau konsep implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ada banyak model implementasi yang dapat digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan. Menurut model implementasi George Edwards II dalam (Widodo, 2016), ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyebaran informasi antara komunikator dan komunikan. Menurut Edward II dalam (Widodo, 2016), para pelaku kebijakan harus diberikan informasi tentang kebijakan publik agar mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menjalankan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai dengan cara yang diharapkan.

b. Sumber daya

Menurut Edward II dalam (Widodo, 2016), memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan adalah sumber daya yang dimaksudkan. Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tidak akan berhasil jika implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya.

c. Disposisi

Edward II menyatakan dalam (Widodo, 2016) bahwa para pelaksana (implementor) kebijakan harus tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya jika implementasi kebijakan ingin berhasil dan efektif. Oleh karena itu, atribut dan sifat yang dimiliki oleh implementor termasuk komitmen, kejujuran, dan demokratis. Jika implementor bersikap baik, kebijakan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan. Jika pembuat kebijakan dan implementor tidak setuju, proses implementasi kebijakan juga gagal.

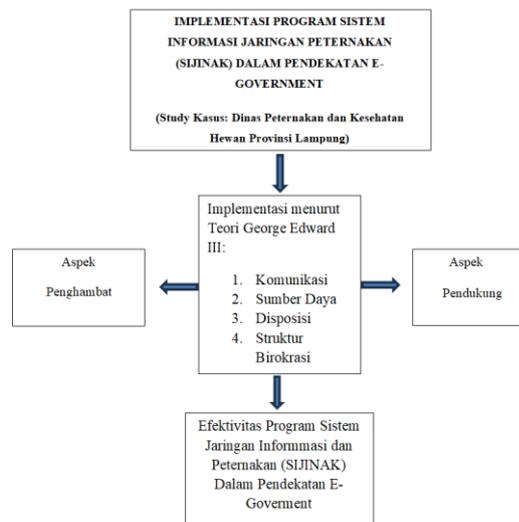
d. Struktur Birokrasi

"Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, dan sebagainya adalah komponennya. Fragmentasi dan standar prosedur operasional (SOP) adalah dua komponen struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung meningkatkan pengawasan dan menghasilkan *red tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Oleh karena itu, dalam Edward II, implementasi kebijakan memiliki empat komponen keberhasilan kebijakan publik: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk memudahkan penelitian ini maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



2. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2016), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., dengan mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah khusus dan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif akan membantu peneliti memecahkan masalah dan mendapatkan hasil seperti yang ditunjukkan oleh foto, catatan lapangan, wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Untuk membantu saya menyelesaikan penelitian saya tentang bagaimana sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) digunakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.

Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama, menurut Lofland dalam (Moleong, 2016). Sumber data tambahan, seperti dokumen dan lainnya, merupakan sumber tambahan. Dengan demikian, jenis data diklasifikasikan menjadi kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan kategori lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan tiga teknik dan alat pengumpulan data, yaitu:

- Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta "merekam" perilaku untuk tujuan tertentu, menurut Cartwright dalam (Sugiyono, 2015). Peneliti melihat secara langsung dinas peternakan dan kesehatan hewan mendata "ternak" dan "pemilik ternak", yang nantinya akan menjadi bagian dari sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak).
- Wawancara menurut Stewart & Cash dalam (Sugiyono, 2015), wawancara adalah interaksi di mana orang berbagi atau bertukar informasi, aturan, tanggapan, perasaan, kepercayaan, dan motif. Selain teknik observasi, penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang ingin diteliti dari sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak) saat pendataan baru di dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung. Peneliti memilih responden untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan di dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Lampung.
- Dokumentasi: Menurut (Sugiyono, 2015, p. 204), dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan melihat atau menganalisis dokumen atau dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang subjek tersebut. Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang hilang dari wawancara. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya diperoleh dari sumber manusia atau sumber daya manusia melalui observasi dan wawancara. Data dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung temuan saya tentang pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan. Dokumen-dokumen ini termasuk peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, panduan pelaksanaan kegiatan, arsip, foto, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Jl. Cut Mutia No. 23b Gulak Galik Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Lokasi ini dipilih karena dinas tersebut



menjalankan sistem informasi jaringan peternakan (Sijinak), yang digunakan untuk mengawasi perkembangan peternakan yang ada di Provinsi Lampung dan sejauh mana sistem ini digunakan. Akibatnya, peneliti menggunakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai lokasi penelitian untuk mendapatkan dokumen, data, dan informasi tentang masalah yang terkait dengan pelaksanaan sistem Sijinak. Sistem Sijinak mengatur masalah peternakan di Provinsi Lampung, sehingga memungkinkan untuk mengevaluasi keberhasilan sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan melalui pembahasan terkait pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung melalui pendekatan E-Government.

Pelaksanaan Sistem informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang terdapat pada peraturan Bupati No. 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Aplikasi sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK), hal ini menjadikan sebuah pelayanan baru dalam pelayanan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas peternakan di Provinsi Lampung. Sehingga dalam penerapan SIJINAK tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini peternakan untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien demi mendukung dan membuat kebijakan pemerintah dalam pelayanan yang berbasis E-Government yang dimana semua lembaga pemerintah yang berada di Provinsi Lampung harus menerapkan sistem pelayanan publik berbasis teknologi.

Sehingga proses pelayanan dari pelaksanaan sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dapat diakses melalui situs : <https://gudter.e-kpb.lampungprov.go.id/>. Sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) merupakan rumah besar pelayanan pengelolaan ternak di Provinsi Lampung yang terintegrasi. Dalam sistem informasi jaringan peternakan ini mengatur beberapa kegiatan dalam mengelola data peternakan yang ada di Provinsi Lampung sebagai berikut :

1. E-Registrasi dan Kartu Ternak
E-registrasi dan kartu ternak merupakan data utama untuk memfasilitasi pelayanan pencatatan pemilik ternak, identitas ternak yaitu tanda sidik dan RIFID Tag yang menjadi basis data populasi ternak dan sebaran dan percetakan kartu ternak sebagai bukti sah kepemilikan ternak.
2. E-Vaksinasi Ternak
Untuk memfasilitasi pelayanan vaksin (SE dan AT) sesuai database ternak di e-registrasi dan pengkartuan ternak dengan memberikan informasi jenis vaksin dan tanggal vaksinasi pada kartu ternak, termasuk vaksinasi rabies hewan peliharaan yaitu anjing dan kucing.
3. E-Izin Perijinan Ternak
Untuk memfasilitasi proses pengeluaran ternak potong keluar daerah sesuai prosedur berdasarkan *suplay* ternak potong dan alokasi kuota pengeluaran ternak potong.
4. E-Pelayanan Kesehatan Hewan
Untuk memfasilitasi proses pelayanan kesehatan hewan yaitu termasuk obat, identitas ternak, penyakit, enias terapi dan penanganan, laporan situasi penyakit hewan secara *realtime* termasuk laporan retribusi pelayanan kesehatan.
5. E-RPH
Memfasilitasi pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH), verifikasi dokumen ternak, pemeriksaan antermortem dan postmortem, surat keterangan daging, database RPH, penjagal dan jin penjagal, serta laporan pemotongan ternak reguler.
6. E-Pasar Ternak
Untuk memfasilitasi jual beli ternak dengan menyediakan informasi pasar data ternak (foto ternak, jenis ternak, umur, berat badan, harga) fungsi ternak (pembibitan, bakalan, potong) pemilik, alokasi, termasuk laporan transaksi dan retribusi.
7. E-Bantuan Ternak



Memfasilitasi proses bantuan ternak kepada masyarakat berupa proposal, verifikasi kelompok penerima, berita acara serah terima, surat pernyataan dan lain lain serta memonitoring laporan perkembangan ternak.

8. E-LAR

Untuk memfasilitasi pengembangan budidaya ternak dengan pendekatan LAR menyediakan informasi peta LAR (koordinat dan luas) dentitas ternak, pemilik ternak kelompok pengelola LAR, fasilitas, koordinasi ketersediaan pakan.

Dalam teori George C. Edward II implementasi kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat dilihat melalui dimensi :

1. Komunikasi

Dapat berupa proses pemberian informasi kepada masyarakat adanya informasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pelayanan publik. Kebijakan yang terbaru di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yaitu sistem informasi jaringan peternakan (SIJINAK) untuk mengelola data ternak dan perkembangan peternakan yang ada di Provinsi Lampung, hal baru bagi masyarakat yang berprofesi sebagai peternak bisa mengakibatkan kesalahpahaman dalam mendapatkan informasi antara pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terkait dengan komunikasinya, sudah berjalan dengan baik dalam memberikan informasi kepada masyarakat itu sendiri. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih bertahap di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang begitu luas dan masyarakat yang masih belum bisa mengerti akan teknologi dari kegunaan SIJINAK. Dan salah satu peternak menjelaskan bahwa para peternak sudah mengerti cara kerja mengenai sijinak dan menurut pendapat peternak SIJINAK sangat membantu para peternak dalam mendapatkan informasi mengenai pemeliharaan peternakan sampai dengan peluang penjualan sehingga hal ini dapat mendorong produktivitas para peternak dalam menghasilkan peternakannya.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu berupa sumber daya manusia, anggaran, peralatan dan kewenangan. Untuk menjalankan sebuah implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya agar kebijakan dapat berjalan baik dengan tujuan yang sudah ditentukan, jika dilihat dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yang terdiri dari 97 pegawai PNS dan 137 pegawai non PNS dan untuk anggaran yang digunakan terbilang sebesar empat puluh lima juta rupiah untuk pelaksanaan sistem SIJINAK. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sumber daya peternak sudah merasa terbantu dengan adanya SIJINAK dalam mendapatkan informasi mengenai pemeliharaan serta perawatan peternakan masyarakat. Sehingga hal ini memudahkan para masyarakat dalam mendapatkan solusi dari permasalahan yang para peternak alami dan dapat memaksimalkan hasil peternakannya.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau watak para pelaksana kebijakan untuk menjalankan implementasi kebijakan agar berjalan secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan kebijakan yang baru meski akan terjadi kesalahpahaman bagi para pelaksana kebijakan tersebut, maka kebijakan SIJINAK yang ada di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung yaitu kebijakan yang baru dan berbeda dari tahun tahun sebelumnya dalam mengelola data ternak di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil wawancara oleh pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung maka dapat dilihat sikap pelaksana kebijakan dapat merespon dengan baik adanya sistem SIJINAK dalam pelayanan masyarakat agar dapat berjalan secara maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yaitu sebuah pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organisasi dalam pengawasan untuk menjalankan implementasi kebijakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung untuk menjalankan sistem SIJINAK sudah bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Lampung dalam keamanan data dan menyediakan layanan berupa website untuk mengakses sistem SIJINAK. Dari

wawancara tersebut keamanan dan pengawasan dari sistem SIJINAK sudah cukup baik dan adanya program *Smart City* Provinsi Lampung dapat mendukung pelayanan di Provinsi Lampung dalam memanfaatkan teknologi dan komunikasi.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan dari beberapa faktor diatas dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang baru ataupun yang lama tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik karena pelayanan dari pemerintah untuk masyarakatitu sendiri. Sehingga respon masyarakat yang ada di Provinsi Lampung dalam pelayanan untuk mengelola dan meningkatkan potensi ternak harus didukung sepenuhnya oleh masyarakatitu sendiri. Dari output data peternak yang sudah terdaftar dari sistem SIJINAK ini berupa kartu ternak yang memiliki batas kode pada kartunya dan berbeda dari kartu pada umumnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.3 Kartu Ternak SIJINAK



VAKSINASI / PENGOBATAN			
No.	Uraian/Usus	Jenis Vaksin	Keterangan

MUTASI TERNAK
REG. NO. : _____

Nama Pemilik Baru : _____
Alamat : _____
Nama Petele : _____
Alamat : _____
Tgl : _____

Kepala Desa/Lurah : _____ Kepala UPT Prokeswan : _____

Yusid Muhammad Saib, S.Pi

KARTU TERNAK
TAHUN 2019
Penda Nomor 9 Tahun 2017

QR Code

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

REGAMATAN : Rhee
DESA : Rhee Baru
DUSUN : Rhee Baru
REG. NO : 52042100002
ID HEWAN : 9560000000112
PETUGAS : Syapenuddin

Kartu ini berlaku 1 (satu) tahun

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (2023)

Gambar diatas merupakan *output* berupa kartu ternak dari proses pelayanan SIJINAK yaitu : e-registrasi, e-izin, e-pelayanan kesehatan hewan, e-rph, e-pasar ternak, e, upt prokeswan, e-bantuan ternak dan e-lar.

Aspek Penghambat Pelaksanaan Sistem informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Dalam menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau bisa dikatakan pelayanan e-government untuk penyelenggaraan pemerintah Provinsi Lampung kepada masyarakatnya yang banyak dan dengan daerah yang luas, adapun masyarakat yang tidak mengerti mengenai teknologi dan komunikasi. Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyediakan pelayanan yang baru agar tercapainya pelayanan yang efektif dan efisien, dilihat dari sistem SIJINAK. SIJINAK merupakan sebuah pelayanan yang baru untuk mengelola data peternakan yang ada di Provinsi Lampung untuk mendukung kualitas peternakan. Sehingga pemerintah Provinsi Lampung harus mendukung secara maksimal agar berjalan dengan baik untuk sistem SIJINAK ini menyediakan sarana dan prasarana untuk melayani masyarakat khususnya para peternak. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam penerapan sistem SIJINAK pasti terdapat aspek penghambat yang dimana faktor tersebut terletak pada kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintahitu sendiri, keterbatasan biaya, seperti penyediaan komputer dan jaringan dalam mengakses sistem SIJINAK tersebut. Selain faktor tersebut kerjasama antar lembaga kain dalam pengawasan dan keamanan data peternakan perlu diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola data peternakan yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu bekerja sama dengan Dinas Kominfotik Lampung untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Demi keberhasilan sistem SIJINAK dalam mendukung *smart city* Lampung tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang harus turut mendukung dan terlibat secara langsung terlaksananya pelayanan publik e-government yang efektif dan efisien.



Aspek Pendukung Pelaksanaan Sistem informasi Jaringan Peternakan (SIJINAK) Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan sistem SIJINAK yang dimana pelaksanaannya memiliki hambatan hambatan untuk mendapatkan keberhasilan yang optimal jika di lihat dari hambatan dalam pelaksanaan sistem SIJINAK ini berupa sarana dan sarana komputer yang masih kurang dan untuk mengakses sistem SIJINAK memerlukan kualitas nternet berupa sinyal yang bagus. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung perlu menambah anggaran yang lebih banyak dan juga menyediakan aplikasi offline untuk mengatasi jika terjadinya gangguan jaringan internet. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung diperlukan kerjasama antar lembaga lembaga lain dalam menjamin pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung. Sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan sistem SIJINAK diperlukan dukungan dan partisipasi antara elemen pemerintah, masyarakat dan juga lembaga sangat penting agar dapat tercapainya pelayanan berbasis teknologi dan informasi untuk mendukung program *smart city* Lampung.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan terdapat temuan bahwa program SIJINAK yang masih belum dilakukan secara efektif dilihat melalui empat dimensi yaitu : (a) dalam komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang masih bertahap di setiap Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang begitu luas dan masyarakat yang masih belum bisa mengerti akan teknologi dari kegunaan SIJINAK, (b) sumber daya pengadaan fasilitas serta pembiayaan pengembangan SIJINAK yang terbatas dan kurangnya tenaga ahli yang memiliki kemampuan pengembangan aplikasi SIJINAK, (c) upaya yang dilakukan untuk tetap bisa menggunakan SIJINAK namun masih terdapat kendala dalam mengakses informasi akibat keterbatasan layanan internet dan (d) dalam pelaksanaannya masih terdapat pembagian tugas pelaksanaan SIJINAK yang belum merata pada kalangan pegawai, (e) untuk meningkatkan perkembangan peternak dan keamanan data ternak dalam pelayanan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi saat ini belum berjalan secara optimal. Sehingga pelaksanaan sistem SIJINAK dengan berbagai kegiatan seperti e-registrasi, e-vaksinasi, e-izin, e-pelayanan, e rph, e-pasar ternak dan e-lar, (f) aspek penghambat dalam terlaksananya sistem SIJINAK berupa komunikasi, sumber daya dan kerjasama dengan lembaga lain untuk keamanan data yang masih kurang maksimal dalam pelaksanaan sistem SIJINAK demi mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian ini maka saran penelitian yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya mendukung inovasi pelayanan baru dalam melayani masyarakat yang begitu luas dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat akan pelayanan terbaru agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendapatkan informasi.
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung dalam menyampaikan informasi pelayanan kepada masyarakat hendaknya perlu keterbukaan akan informasi pelayanan dengan mengadakan sosialisasi mengenai sistem SIJINAK berbasis teknologi sehingga masyarakat mengerti dan paham akan kegunaan sistem SIJINAK itu sendiri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Brown, Wildavsky. (1983). *Implementasi Sebagai Perluasan Aktivitas Yang Saling Menyesuaikan*. the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Edward III, George C. (2018). *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London-England.



- Grindle, Merilee S. (2019). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princnton University Press, New Jersey.
- Mazmanian, D, H., dan Paul, A, Sabatier. (2016). *Implementation and Public Policy*. New York, Harper Collins.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. (2015). *Policy Implementation and Bureaucracy*. second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). *Revitalisasi administrasi negara: reformasi birokrasi dan e-governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, 234.
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia
- Jumroh, M. (2021). *Teori Implementasi Kebijakan*, 1-70.
- Megawati, L., Razak, A. R., & Parawu, H. E. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan E-Government Terhadap Disiplin Pegawai Di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tanah Toraja*.
- Moleong, L. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. , 101-102.
- Instruksi Presiden (INPRES) No 3 Tahun 2003. (n.d.). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008. (n.d.). *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Indonesia.